

Rangkuman

Kilat

PKS 2021

2021

SEJARAH WAJIB

Sesuai Kisi-Kisi

Kata Pengantar

Tak terasa sudah genap dua tahun Rangkuman Kilat menemani Kilaters dalam menghadapi ujian. Pada bulan ini, November, dua tahun yang lalu, lahirlah Rangkuman Kilat Kimia yang pertama kali dipublikasikan dan menerima banyak respon positif. Sejak saat itu, Rangkuman Kilat terus berkembang dengan bergabungnya teman-teman Kilaters yang membantu proses rangkuman menjadi sebuah Tim Kilat. Tim Kilat terus berkembang dari yang hanya mencakup beberapa mata pelajaran MIPA saja hingga sekarang dapat mencakup hampir semua mata pelajaran yang diujikan.

Kini, Rangkuman Kilat akan mencapai versi akhirnya pada PAS 2021. Hal ini dikarenakan pada semester 2, para kreator dan tim kilat yang sudah kelas XII tidak akan menghadapi PTS/PAT lagi. Oleh karena itu, Rangkuman Kilat akan berhenti produksi pada tahun 2022, **kecuali ada penerus yang ingin melanjutkan Rangkuman Kilat.**

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kilaters yang sudah mempercayai Rangkuman Kilat sebagai salah satu media pembelajaran selama proses belajar untuk mempersiapkan ujian. Kami segenap Tim Kilat ingin meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik dari materi, pembahasan, design tampilan, hingga konsistensi upload. Kami harap kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan.

Untuk teman-teman yang sudah diterima di universitas swasta, semangat untuk menempuh perjalanan hidup yang baru. Untuk teman-teman yang sudah diterima atau masih berjuang untuk diterima di universitas luar negeri, semangat, hati-hati di dalam perjalanan, dan sukses untuk ke depannya. Untuk teman-teman #pejuangPTN, semangat ya... selama ada keyakinan, pasti ada jalan.

Akhir kata, terima kasih dan #staykilat !

Feedback : teamkilats@gmail.com | Support : <https://saweria.co/teamkilat>

**TEAM
KILAT**
Dear TK, Terima kasih atas dedikasinya.

1. Pemimpin DI/TII Jawa Tengah:

Amir Fatah Wijaya Kusumah

2. Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis:

Andi Azis adalah seorang mantan perwira KNIL (Koninklijke Nederlands Indisch Leger), berawal dari tuntutan Andi Azis agar hanya pasukannya saja yang dijadikan sebagai pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur.

Akan tetapi, keinginan ini ditolak oleh pemerintah Indonesia, yang kemudian mengirimkan pasukan TNI ke Makassar. Andi Azis dan pasukannya menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI ke Makassar. Dalam suasana politik yang sedang cukup tegang saat itu terdengar berita bahwa pada 5 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makassar, bertujuan untuk menjaga keamanan di sana. Kesatuan TNI/APRIS ini dipimpin oleh Mayor HV Worang, diangkut dengan dua buah kapal. Berita kedatangan mereka lantas membuat pasukan bekas KNIL merasa khawatir akan terdesak dengan kehadiran pasukan baru tersebut. Akhirnya, mereka bergabung dan menamakan diri "Pasukan Bebas" di bawah pimpinan Kapten Andi Azis.

3. Usaha Pemerintah mengatasi gerakan DI/TII:

Pemerintah mengeluarkan ultimatum pada 8 April 1950 yang memerintahkan agar Andi Azis segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan tindakannya ke Jakarta dalam kurun waktu 4x24 jam. Jika Andi Azis ultimatum tersebut tidak ditaati, maka Kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan membom kota Makassar. Namun, Andi Azis tidak goyah, ia tetap tidak menuruti perintah tersebut. Sampai akhirnya, setelah batas waktu sudah terlewat, pemerintah mengirim pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang dan tanggal 15 April 1950, Andi Azis bersedia datang ke Jakarta. Mulanya Andi Azis dijanjikan oleh Sri Sultan HB IX, bahwa jika beliau bersedia datang ke Jakarta, dirinya tidak akan ditangkap. Tetapi, begitu Andi Azis sampai di sana, yang terjadi adalah sebaliknya, pemerintah secara sigap langsung menahan Andi Aziz. Andi Aziz kemudian diadili pada tahun 1952 dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun.

4. Operasi Penumpasan G30S PKI

Dimulai dengan Mayor Jenderal Soeharto yang mengambil alih komando alih Angkatan Darat dibalik kekacauan yang terjadi dan meninggalnya Jenderal Ahmad Yani, Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) segera menghimpun pasukan Divisi Siliwangi dan Kavaleri. Setelah daerah sekitar Istana Merdeka dan Medan Merdeka bersih dari pasukan G30S/PKI, Operasi penumpasan G30S PKI diarahkan ke wilayah Bandara Halim Perdana Kusuma, dimana Pada pukul 06.00 pagi, lapangan udara Halim telah dapat dikuasai kembali.

Namun karena luasnya kompleks Halim, kekuatan-kekuatan pemberontak ternyata tidak seluruhnya mengundurkan diri.

Gerakan penumpasan selanjutnya adalah menuju desa Lubang Buaya yang diperkirakan sebagai tempat pembunuhan terhadap 7 orang Perwira Tinggi Angkatan Darat. Tembakan-menembak terjadi di Lubang Buaya antara RPKAD dengan satuan-satuan Yon 454, sehingga jatuh korban seorang gugur dan dua orang luka--luka.

Pada pukul 14.00 gerakan pembersihan oleh satuan-satuan RPKAD dan Yon 328 Kujang di sekitar Cililitan dan Lubang Buaya dihentikan karena para pemberontak telah buyar melarikan diri ke luar kota.

Operasi Trisula dan Operasi Kikis

Sisa-sisa kaum komunis yang lari akhirnya berkumpul di Blitar Selatan sekitar tahun 1966. Mereka memusatkan basis perlawanan di sana. Di Blitar Selatan, PKI menggelar Sekolah Perlawanan Rakyat (SPR) dan Kursus Kilat Perang Rakyat (KKPR). Pelatuhnya adalah para desertir tentara yang membelot ke pihak komunis. un 1968, Operasi Trisula mulai digelar. Kolonel Wintarmin diangkat sebagai komandan. Tentara menyisir kawasan hutan Blitar Selatan untuk mencari pemberontak dimana mereka banyak menangkap pasukan PKI.

Pihak lawan yang semula bersembunyi di hutan-hutan terpaksa meninggalkan persembunyiannya dan bergeser ke arah utara. Di sana sudah siap tim penyapu dari darat menghentikan mereka.

Operasi Trisula mencatat 33 tokoh PKI ditembak mati. Sementara 850 tokoh PKI bisa ditangkap selama tiga bulan operasi.

Operasi Kikis juga merupakan operasi pemberantasan sisa-sisa pengikut gerakan PKI yang dilakukan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dimana DN Aidit, sebagai Ketua PKI yang banyak diduga sebagai dalang dibalik pemberontakan ditemukan dan tewas tertembak dalam sebuah konflik dalam operasi tersebut

Sebagai hasil dari kedua operasi ini, sebagian tokoh PKI diadili di mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dan beberapa lainnya dijatuhi hukuman mati.

5. Siswa mampu menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I merupakan kabinet keempat setelah pembubaran RIS yang berlangsung dari tanggal 30 Juli 1953 - 24 Juli 1955 diketuai oleh Ali Sastroamidjojo dan Mr. Wongsonegoro sebagai wakil ketuanya.

Program Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah sebagai berikut:

Dalam Negeri

- Keamanan

Memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat

Menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan Negara

- Pemilihan Umum

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Kemakmuran dan Keuangan

Menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata
Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota

Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan

Memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara

- Organisasi Negara

Memperbaharui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah

Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai

Memberantas korupsi dari birokrasi

- Perburuhan

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya

- Perundang-undangan

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan

Politik Luar Negeri

Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia

Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara

Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Kebijaksanaan Pemerintah

Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I mencapai keberhasilan yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA). KAA diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.

6. Siswa mampu menyebutkan tentang tugas dewan konstituante tahun 1955

- Membuat Undang – Undang Dasar yang baru untuk menggunakan UUDS 1950

7. Siswa mampu menyebutkan tentang tiga partai besar mendukung kabinet Ali Sastroamidjojo II

Masyumi, PNI dan NU

8. Siswa mampu menjelaskan tentang sistem ekonomi Gerakan Benteng

Sumitro Djojohadikusumo pun mencanangkan Gerakan Benteng yang dimulai sejak April 1950.

Pelaksanaan Gerakan Benteng terdiri dari dua kebijakan:

- Pertama, Gerakan Benteng mengistimewakan importir pribumi. Importir pribumi diberi kewenangan impor khusus. Selain itu, mereka juga menerima jatah devisa dengan kurs murah.
- Kedua, kebijakan ekonomi dilakukan dengan pemberian kredit modal pada pengusaha yang selama ini sulit memperoleh pinjaman dari lembaga pendanaan seperti bank.

Lewat Gerakan Benteng, pemerintah memilih pengusaha-pengusaha pribumi yang akan menerima bantuan. Para pengusaha yang dinamakan importir Benteng ini telah lulus sejumlah persyaratan di antaranya:

- a. Merupakan importir baru
- b. Berbentuk badan hukum, perseroan terbatas, atau kongsi

- c. Memiliki modal kerja minimal sebesar Rp 100.000
- d. Modal kerja sekurang-kurangnya 70 persen berasal dari bangsa Indonesia asli (pribumi) atau golongan ekonomi lemah.
- e. Memiliki kantor untuk pegawai dan tenaga kerja

Selama pelaksanaan Gerakan Benteng, persyaratan ini beberapa kali diubah dan diperbaiki agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak berhak.

Selama tiga tahun pelaksanaan, ada sekitar 700 perusahaan yang menerima bantuan dari program Gerakan Benteng. Namun ditengarai banyak penerima bantuan yang curang. Para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebuah alat bagi para pengusaha non pribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah. Ini menjadi salah satu penyebab berakhirnya sistem ekonomi Gerakan Benteng. Banyak penerima lisensi impor menjual lisensinya kepada importir yang sudah mapan. Mereka dikenal dengan istilah "aktentas". Selain itu, persyaratan kepemilikan modal juga menjadi perdebatan karena mendiskriminasi pengusaha Tionghoa. Pada September 1955, Gerakan Benteng dikaji oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan Sumitro yang saat itu menjabat Menteri Keuangan. Persyaratan berdasarkan etnis akhirnya dihapus dan diganti dengan persyaratan uang muka.

Pada bulan Maret dan April 1957, Kabinet Karya atau yang disebut Kabinet Djuanda menghentikan Gerakan Benteng seiring dengan transisi ke demokrasi terpimpin.

9. Siswa mampu menyebutkan langkah pertama yang diambil demokrasi terpimpin

Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957 yang dibentuk dan kepalai oleh Soekarno sendiri.

10. Siswa mampu menyebutkan tentang penyimpangan demokrasi terpimpin

- a. Lembaga-lembaga negara mempunyai inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom)
- b. Prosedur pembentukan MPRS yang diangkat oleh Presiden
- c. Prosedur pembentukan DPAS yang ditunjuk dan diketuai oleh presiden
- d. Prosedur pembentukan DPRGR yang ditunjuk oleh presiden dan pembubaran DPR yang pada hakikatnya sama derajatnya dengan Presiden
- e. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN, padahal seharusnya ditetapkan oleh MPR
- f. Pengangkatan Presiden Seumur Hidup
- g. Pembentukan MPRS oleh presiden melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

11. Siswa mampu menjelaskan pengaruh demokrasi terpimpin

1. Kekuasaan Presiden

Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa paling tinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemerintahan ini mulai diberlakukan pada 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.

Dengan diberlakukan sistem demokrasi terpimpin, presiden Soekarno pada masa itu bisa mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya, khususnya di bidang politik.

2. Peran Partai Politik Terbatas

Pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, fungsi partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai peraturan presiden Soekarno.

3. Peran Militer Semakin Besar

Pada masa demokrasi terpimpin, peran tentara di Indonesia sangat kuat. Masa itu militer mempunyai dua fungsi (dwifungsi), yakni sebagai garda pertahanan negara dan juga dapat berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran pasukan militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia.

4. Berkembangnya paham Komunisme

Pada masa itu, keterkaitan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan sangat baik sehingga paham komunisme berkembang pesat pada masa itu.

5. Anti Kebebasan Pers

Pers yang mempunyai peran sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. peraturan pemerintah terhadap pers tersebut mengakibatkan sebagian besar media menutup diri dan tidak berani menyiarkan berita lantaran adanya ancaman dicekal.

6. Sentralisasi Pemerintah Pusat

Sistem demokrasi terpimpin menimbulkan ketidakadilan, salah satunya ialah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kerusuhan.

7. Terjadi Pelanggaran HAM

Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan yang semena-mena terhadap rakyat.

12. Siswa mampu menjelaskan tentang sistem ekonomi Ali-Baba

Pelaksanaan Kebijakan Sistem Ekonomi Ali Baba

- Memberikan pelatihan wajib bagi para pengusaha pribumi, serta memberikan tanggung jawab agar tenaga bangsa Indonesia mampu menduduki jabatan-jabatan.
- Adanya kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional yang disediakan oleh pemerintah.
- Pemerintah memberikan perlindungan bagi penguasa pribumi, agar mampu bersaing dengan perusahaan asing yang ada.

Kegagalan Sistem Ekonomi Ali Baba

- Pengusaha pribumi banyak memperoleh fasilitas bantuan kredit. Hanya saja hak-hak istimewa itu ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha pribumi. Kredit tersebut malah dipindahkan kepada pengusaha non-pribumi secara sepihak.
- Kredit yang diberikan awalnya untuk mendorong kegiatan produksi, sayangnya telah disalahgunakan untuk kegiatan konsumsi.
- Pengusaha pribumi belum berpengalaman, tidak mampu bersaing dalam pasar bebas.
- Peningkatan inflasi dan maraknya kasus korupsi

13. Siswa mampu menganalisis tentang ciri kehidupan politik pada masa Orde Baru

- Penahanan Tokoh Politik dan Pembredelan Media Massa

Rezim Orde Baru menggunakan cara-cara yang represif untuk mengendalikan gejala-gejala politik yang timbul dari masyarakat. Pemerintah Orde Baru yang bercorak militeristik otoriter, melakukan banyak penahanan politik kepada mahasiswa, tokoh politik dan eks simpatisan PKI. Pemerintah Orde Baru menggunakan isu komunisme untuk melakukan penahanan terhadap lawan-lawan politiknya. Pada tahun 1978, terjadi lebih dari penahanan terhadap orang-orang yang dianggap berhubungan dengan peristiwa G30S.

14. Siswa mampu mengklasifikasikan tugas Presiden B.J. Habibie dalam menjalankan agenda reformasi

Kebijakan Presiden B.J. Habibie contohnya :

- Mengganti 5 paket undang-undang, 3 di antaranya diubah agar lebih demokratis, yaitu UU Otonomi Daerah, UU Pers, dan UU Independensi Bank Indonesia
- Rakyat bebas dalam menyalurkan aspirasi
- Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers dan mengangkat kebebasan berpendapat media
- Jejak pendapat wilayah Timor-Timur
- Memberikan abolisi (hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana) kepada 18 tahanan dan narapidana politik
- Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang
- Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi kepolisian RI.

15. Siswa Mampu menganalisis kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus salah satunya kasus suap Kempenora Wafid Muharram atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazaruddin.

Hal ini dibuktikan dengan 10 tahun kepemimpinan SBY, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar.

Indonesia juga aktif dalam forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change

Kemajuan lain yang dilakukan SBY:

- Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Adanya kebijakan pendidikan wajib 12 tahun
- Pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas di seantero Indonesia

Kasus kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya berupa:

- Kasus Century
- Kriminalisasi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan
- Kasus Sekretariat Gabungan
- Isu jaksa agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji
- Konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia

16. Siswa mampu mengklasifikasikan tentang berbagai persiapan PKI sebelum melancarkan pengkhianatan melalui Gerakan September 1965

PKI melakukan beberapa persiapan antara lain:

- Membuat Biro Khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzzaman yang bertugas mempersiapkan dan merancang perebutan kekuasaan serta menyebarkan ideologi komunis ke dalam TNI dan organisasi politik lain.
- Mengusulkan membentuk Angkatan ke-5 dengan jalan mempersenjatai kaum buruh dan tani, yang akan dibantu oleh Cina dengan memberikan 100.000 pucuk senjata ringan dengan gratis.
- Melakukan aksi sepihak seperti Peristiwa Indramayu, Bandar Betsy dan Peristiwa Jengkol.
- Melakukan aksi teror seperti terjadinya peristiwa Kanigoro, Kediri.
- Melancarkan isu Dewan Jenderal terhadap TNI berdasarkan Dokumen Gilchrist.

17. Siswa mampu menyebutkan tentang ciri demokrasi terpimpin

- Dominasi kekuasaan Presiden Soekarno.
- Peran dari partai politik yang kemudian dibatasi.
- Peran dari pihak militer (ABRI) dan PKI semakin kuat.
- Penerapan kebijakan Manipol / USDEK (Manifesto Politik / UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia).
- Penerapan kebijakan NASAKOM (Nasionalis Agama Komunis)
- MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
- Posisi DPR di bawah Presiden.
- Pimpinan Mahkamah Agung diberi status menteri.
- Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.
- Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia.

18. Siswa mampu menjelaskan tentang revolusi hijau pada masa Orde baru

- Revolusi Hijau merupakan sebuah upaya modernisasi sistem dan budaya pertanian di Indonesia, dimana petani dikenalkan dengan penggunaan pupuk buatan, pestisida, bibit unggul, peralatan pertanian modern dan sistem budidaya pertanian yang baru.

Penerapan Revolusi Hijau di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1970 hingga 1980, pemerintahan Orde Baru melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian.

Pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru mengeluarkan program Pancausaha Tani yang terdiri dari lima asas utama, yaitu:

- Pemilihan dan penggunaan bibit unggul
- Pemupukan secara teratur

- Irigasi yang baik dan cukup
- Pemberantasan hama secara intensif
- Teknik penanaman yang teratur

Revolusi Hijau pada masa pemerintahan Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan besar dunia pada dekade 1980-an. Dampak positif Revolusi Hijau, yakni:

- Meningkatnya kesejahteraan petani
- Menguatnya perekonomian pedesaan
- Meningkatkan ketahanan pangan nasional
- Membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi

Sedangkan dampak negatif dari Revolusi Hijau adalah:

- Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan
- Penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata menimbulkan kesenjangan
- Munculnya kapitalisasi dalam sektor pertanian

19. Siswa mampu menyebutkan tentang munculnya era reformasi

Era reformasi secara garis besar dimulai dari pasca presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Pada saat itu, wakil dari presiden Soeharto yaitu B.J Habibie naik menjadi presiden untuk mencegah adanya kekosongan jabatan.

20. Siswa mampu menjelaskan penyebab munculnya reformasi di Indonesia

Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Secara umum latar belakang munculnya reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi. Di mana semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

- Dominasi partai Golongan Karya di bidang politik
- Hasil pembangunan tidak merata
- Munculnya krisis ekonomi
- Adanya keretakan dari sistem kekuasaan sentralistik dan militeristik orde baru yang mengedepankan kestabilan dan status quo pemerintah
- Maraknya gerakan anti kemapanan

21. Siswa mampu mengklasifikasikan pemimpin gerakan disintegrasi di awal kemerdekaan Indonesia

- DI/TII Jawa Tengah (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)
Amir Fatah Wijaya Kusumah

- Pemberontakan Andi Azis - Andi Azis
- PRRI/Permesta
 - a. Letnan kolonel Ahmad Husein I
 - b. Letkol Ventje Sumual
 - c. Kapten Wim Najoan
 - d. Mayor Eddy Gagola
 - e. Mayor Dolf Runturambi
 - f. Kolonel D.J. Somba
 - g. Kolonel Alexander Evert Kawilarang
- DI/TII Kartosuwiryo
Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
- PKI Madiun
Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap
Musso/Muso Munawa
- Pemberontakan Sulawesi Selatan Zakar
Kahar Muzakkar

22. Siswa mampu menyebutkan tentang sejumlah kabinet dan tahun pemerintahannya pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia

- Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951).
- Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952).
- Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953).
- Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955).
- Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956)
- Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - Maret 1957).
- Kabinet Juanda (Maret 1957 - Juli 1959).

23. Siswa mampu menjelaskan Pada masa pemerintahan Orde Baru, melakukan pembangunan dengan program Repelita yang mempunyai tujuan

Repelita I (1969–1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.

Repelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.

Repelita III (1979–1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.

Repelita IV (1984–1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.

Repelita V (1989–1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

Repelita VI (1994–tidak selesai) bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi asing dalam rangka menggenjot perekonomian dan industri nasional.

24. Siswa mampu mengklasifikasikan tentang Pada masa Reformasi di Indonesia dikeluarkan beberapa ketetapan MPR dan amandemen UUD 1945 dengan tujuan

Tujuan perubahan UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum.

Hal ini dilatarbelakangi dengan bagaimana cara Rezim Soeharto menjalankan penyelenggaraan negara. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

- Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999
- Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000
- Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001
- Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002

25. Siswa mampu menyebutkan tentang awal demokrasi terpimpin

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin yang berlaku dari 1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan.

26. Siswa mampu menyebutkan tokoh yang tewas di laut Aru

Komodor Yos Sudarso

27. Siswa mampu menyebutkan tentang tokoh pemilu 1

Peserta pemilu paling populer yang diadakan di tahun 1955:

- Sidik Djojokusarto (Partai Nasional Indonesia/PNI)
- Soekiman Wirjosandjojo (Masyumi)
- Abdul Wahab Hasbullah (Nadhlatul Ulama/NU)
- Alimin (Partai Komunis Indonesia/PKI)
- Anwar Tjokroaminoto (Partai Syarikat Islam Indonesia/PSII)
- Johannes Leimena (Partai Kristen Indonesia/Parkindo)
- I.J. Kasimo (Partai Katolik)
- Sutan Syahrir (Partai Sosialis Indonesia/PSI)

28. Siswa mampu menjelaskan tentang Repelita ke II

Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) II dimulai tanggal 1 April 1974 dan berakhir pada tahun 1979.

Target utama yang ingin dicapai dalam Repelita II adalah:

- Tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat umum
- Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak
- Keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna
- Keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata
- Meluasnya kesempatan kerja

Guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, produksi sektor pertanian harus meningkat sekitar 4,6 persen setahun. Kemudian, sektor industri sekitar 13 persen, pertambangan 10,1 persen, perhubungan 10 persen, bangunan sekitar 9,2 persen, dan sektor-sektor lain sekitar 7,7 persen. Dengan laju pertumbuhan seperti itu, akan tercapai perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan pembangunan. Secara keseluruhan, Repelita II berhasil dilaksanakan, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah inflasi. Kemajuan yang paling pesat terlihat dalam Repelita II ada di bidang pendidikan, baik dalam hal pembangunan sekolah, pengangkatan guru, penyediaan buku belajar, dan peningkatan mutu pendidikan.

29. Siswa mampu menyebutkan tokoh pengganti presiden Soeharto

Bacharuddin Jusuf Habibie

30. Siswa mampu menjelaskan tentang pendorong Integrasi

- Adanya persamaan sejarah, rasa senasib dan seperjuangan pada jaman dahulu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia dan lepas dari penjajah mendorong integrasi nasional.
- Adanya ideologi nasional, berupa Pancasila yang bisa menjadi pendorong integrasi.
- Adanya keinginan untuk bersatu.
- Adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini perlu diminimalisir agar integrasi nasional dapat terwujud di setiap lapisan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

31. Siswa mampu menjelaskan tentang penyebab terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal

Pada masa Demokrasi Liberal Indonesia menganut sistem kepartaian multipartai, dan tiap-tiap partai lebih mementingkan kepentingan golongannya dan partainya masing-masing. Sistem pemerintahan parlementer di mana kedudukan kabinet sangat tergantung pada kekuasaan di parlemen, Terlebih lagi dengan adanya kepentingan partai politik yang saling berbenturan satu sama lain karena mempunyai kepentingan dalam setiap golongannya, ada beberapa tuntutan dari parlemen yang tidak tercapai, target program yang belum tercapai karena kabinet sewaktu-waktu dapat dijatuhkan mosi tidak percaya.

32. Siswa mampu menganalisis latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45.

- Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem

pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

- Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
- Situasi politik yang kacau dan semakin memburuk.
- Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan separatisme.
- Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional
- Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk.
- Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.

Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari tiga dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai Reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat (desentralisasi). Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah-pemerintah daerah.

33. Siswa mampu menganalisis tentang reformasi

(silahkan diambil sesuai kebutuhan)

Pemerintahan Bacharuddin Habibie (1998-1999)

Bacharuddin Jusuf Habibie, adalah wakil presiden selama masa jabatan presiden sebelumnya, Suharto. Dia menggantikan Soeharto pada tahun 1998 ketika Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Namun, hal ini tidak mengakhiri sistem politik yang telah diterapkan selama Orde Baru. Banyak orang Indonesia sangat mencurigai Habibie karena kedekatannya dengan Suharto (yang telah menjadi sosok ayah bagi Habibie) dan fakta bahwa dia adalah pemain penting dalam sistem patronase politik Suharto. Penolakan Habibie untuk memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap harta kekayaan Suharto hanya memperkuat rasa ketidakpercayaan ini.

Habibie tidak memiliki pilihan lain selain meluncurkan program-program reformasi. Dia akan melakukan "bunuh diri politik" jika tidak mematuhi tuntutan masyarakat Indonesia itu. Selama masa kepresidenan Habibie, 30 undang-undang (UU) baru disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), beberapa di antaranya ditandai dengan perbedaan-perbedaan fundamental dengan perpolitikan di masa lampau.

Sejumlah tindakan reformasi penting adalah:

- Dimulainya kebebasan pers
- Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru
- Pembebasan tahanan-tahanan politik
- Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun
- Desentralisasi kekuasaan ke daerah

Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. Kendati begitu, parlemen belum mempunyai niat untuk mengurangi pengaruh politik militer dan memerintahkan penyelidikan terhadap kekayaan Suharto.

Indonesia memasuki masa peningkatan kekerasan di daerah. Jawa Timur dilanda pembunuhan misterius (yang mungkin dilakukan oleh unit-unit tentara) sementara kekerasan agama berkobar di Jakarta, Ambon (Maluku), Kupang (Nusa Tenggara Timur) beserta Kalimantan Barat. Selain itu, ada tiga daerah yang memberontak terhadap Pemerintah Pusat: Aceh (Sumatera), Irian Jaya (Papua) dan Timor Timur.

Ini semua menghasilkan kondisi yang membuat para investor asing sangat ragu-ragu untuk berinvestasi, sehingga menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Tidak kalah penting adalah pembersihan sektor keuangan Indonesia, yang telah menjadi jantung dari Krisis Keuangan Asia di akhir tahun 1990-an. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), didirikan pada Januari 1998, menjadi sebuah lembaga yang kuat yang melakukan serangkaian kegiatan terpadu dan komprehensif mencakup masalah seperti program liabilitas bank, pemulihan dana negara, restrukturisasi perbankan, restrukturisasi pinjaman bank, dan penyelesaian sengketa kepemilikan saham.

Kasus Timor Timur adalah salah satu hal yang menyebabkan banyak konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Timor Timur telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1975 tetapi diinvasi oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Hal ini tidak mengakhiri keinginan Timor Timur untuk merdeka. Habibie memiliki sikap terbuka terhadap kemerdekaan Timor Timur. Dia menyatakan bahwa jika Timor Timur menolak status provinsi otonomi khusus di Indonesia, maka Timor Timur dapat merdeka.

Pernyataan Habibie ini tidak disetujui oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sangat ingin mencegah pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Menurut pihak TNI, pemisahan Timor Timur itu berbahaya bagi persatuan Indonesia karena dapat menyebabkan efek domino di provinsi-provinsi lain. Diputuskan bahwa rakyat Timor Timur boleh membuat keputusan ini melalui referendum. Hasil referendum ini adalah bahwa 78% pemilih memilih untuk merdeka. Tentara Indonesia kemudian bereaksi dengan menyerang banyak wilayah di Timor Timur, menewaskan lebih dari seribu orang.

Reputasi Habibie rusak parah akibat hilangnya kendali atas situasi politik di Timor Timur. Meskipun unit tentara dan milisi sipil yang melakukan tindak kekerasan ekstrim, Habibie secara pribadi dianggap bertanggung jawab sebagai presiden yang menjabat. Selain itu, Habibie sendiri dikaitkan dengan skandal korupsi besar yang melibatkan Bank Bali. Bank ini menerima dana dari BPPN untuk rekapitalisasi tetapi - diduga - hampir setengah dari dana tersebut digunakan oleh tim kampanye Habibie.

Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, Wahid menunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan, terlebih lagi, hanya berisi beberapa tokoh reformis saja. Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI namun hal ini menyebabkan konflik dan kemudian hilangnya dukungan dari TNI.

Tanpa dukungan dari TNI, hanya ada sedikit cara untuk bertahan sebagai presiden Indonesia yang saat itu dilanda konflik dan kekerasan di banyak daerah. Kerusuhan-kerusuhan di daerah ini membutuhkan intervensi TNI namun karena konflik dengan Wahid, TNI tampaknya tidak tertarik menyelesaikan atau mengintervensinya yang mengakibatkan merosotnya kekuasaan Presiden Wahid.

Kasus-kasus korupsi tampaknya masih sangat sering terjadi. Pada tahun pertamanya sebagai presiden, Wahid memecat tujuh menteri yang semua - diduga - terlibat dalam kasus korupsi. Empat dari menteri-menteri tersebut berasal dari empat mitra koalisi yang paling penting: PDI-P, Golkar, PPP dan PAN. Ini membuat Wahid menjadi semakin terisolasi. Dan - lebih parah lagi - Wahid sendiri juga dikaitkan dengan dua skandal korupsi yang akhirnya menyebabkan pemakzulannya. Kedua skandal itu dikenal sebagai 'Buloggate' dan 'Bruneigate', masing-masing melibatkan ketidakjelasan penggunaan dana publik. MPR Indonesia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk memakzulkan Wahid dan Megawati kemudian ditunjuk menjadi presiden, sementara Hamzah Haz (pemimpin PPP) menjadi wakil presiden yang baru.

Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru Soeharto, almarhum Ir Soekarno (Presiden Indonesia yang pertama) menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Soekarno adalah pahlawan nasional yang telah mengabdikan hidupnya untuk - dan berhasil - mencapai kemerdekaan. Sebagian besar pengunjuk rasa anti-Suharto lahir selama rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan karena itu mereka mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai era pra-Suharto. Tetapi bagi mereka Soekarno mewakili kebebasan, kemerdekaan dari Suharto. Oleh karena itu menjadi logis bahwa puterinya, Megawati, bisa mengandalkan dukungan besar dari masyarakat.

Namun, dukungan ini hanya didasarkan pada statusnya sebagai puteri Soekarno dan tidak didasarkan pada visi politiknya maupun keterampilannya. Kabinetnya tidak banyak berbeda dari kabinet awal Wahid: berisi basis partai-partai yang beragam dan perwira TNI juga terwakili dengan baik. Megawati sendiri tidak melakukan banyak pengambilan keputusan, dia menyerahkannya pada para menteri. Tidak ada tanda-tanda bahwa masalah korupsi ditangani sementara status quo dalam pemerintahan berlanjut.

Namun, meskipun Megawati sendiri tidak tampak sangat mendukung reformasi politik, proses reformasi sebenarnya telah dirintis pada tahun 1999 ketika parlemen mulai merancang banyak UU baru (termasuk amandemen-amandemen konstitusi) yang akan berlaku efektif selama kepresidenan Megawati. Langkah-langkah reformasi ini menyiratkan peningkatan signifikan dalam checks and balances demokratis yang mengakhiri kemungkinan kembalinya rezim otoriter. Kebijakan-kebijakan reformasi ini menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan Pemerintah Pusat. Selain itu, cabang-cabang eksekutif dan legislatif dipisahkan dengan lebih ketat.

Pendahulu Megawati (Wahid) melakukan upaya kuat untuk mengurangi pengaruh TNI (yang benar-benar melemahkan posisinya), tetapi Megawati tidak berniat untuk ikut campur dengan urusan TNI. Akibatnya, TNI kembali mendapatkan sejumlah pengaruh dalam politik. Apalagi, perkembangan internasional juga meningkatkan peran TNI. Setelah serangan 11 September 2001 terhadap Menara Kembar di New York, pemerintah Amerika Serikat melanjutkan kerjasama dengan militer Indonesia (yang sempat terhenti sejak partisipasi TNI dalam kekerasan di Timor Timur di tahun 1999) untuk memerangi terorisme internasional.

Meskipun MPR telah berhati-hati dalam mengurangi peran politik tentara, Panglima Besar TNI lah yang menyatakan pada tahun 2004 bahwa fraksi TNI harus dihapuskan dari MPR. Seorang perwira TNI yang ingin aktif dalam dunia politik harus mengundurkan diri terlebih dulu dari

posisinya di TNI. Reformasi ini direalisasikan tetapi tidak berarti mengakhiri pengaruh politik TNI dalam masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, TNI adalah kekuatan yang besar karena para mantan jenderal yang ingin aktif dalam politik masih bisa mengandalkan jaringan di dalam TNI, apalagi, tentara masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha di daerah.



Dibuat oleh
Centrino